

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu

The Effect of Community Participation, Government Transparency and Public Accountability on the Efficiency of School Operational Assistance Funds at Public Junior High Schools at Rimbo Ulu District

Helfia Chintya Ayu¹ Tommy Ferdian² dan Risni Nelvia³
Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muara Bungo,
Jl. Diponegoro No 27, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah
Kabupaten Bungo, Jambi, Indonesia. Kode Pos : 37214
Email :

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu. Populasi dalam penelitian ini ada 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 145 responden. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan dan akuntabilitas publik terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu Tahun 2015 diketahui ada pengaruh signifikan secara simultan diperoleh F_{hitung} sebesar 228,060 dan nilainya lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2.67 pada tingkat signifikan (α) = 0,05 dan berdasarkan uji determinasi (R^2) dapat disimpulkan bahwa 82,5% variabel efisiensi penyaluran Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Rimbo Ulu dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik sedangkan 18,5% merupakan pengaruh dari variabel bebas yang lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini

Kata Kunci: *Partisipasi, Transparansi, akuntabilitas*

Abstract

This study aims to determine the effect of community participation, government transparency and public accountability on the efficiency of distribution of school operational assistance funds at public junior high schools in Rimbo Ulu district in 2015. The population in this study were 5 junior high schools (SMP).) Negeri In Rimbo Ulu District and the sample in this study amounted to 145 respondents. Based on the results of research on the effect of community participation, government transparency and public accountability on the efficiency of distribution of School Operational Assistance (BOS) funds at State Junior High Schools (SMP) in Rimbo Ulu District in 2015, it is known that there is a significant effect simultaneously obtained F_{count} of 228.060 and a greater value from the F table of 2.67 at a significant level (α) = 0.05 and based on the test of determination (R^2) it can be concluded that 82.5% of the efficiency variable in the distribution of BOS Funds at State Junior High Schools (SMP) in Rimbo Ulu District is influenced by community participation, transparency, and public accountability while 18.5% is the influence of other independent variables that were not included in this study

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pendanaan pendidikan dasar yang signifikan dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program Nasional di bidang pendidikan yang menyerap anggaran besar dan langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat luas. Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 meletakkan prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik, serta efisiensi. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu (www.diknas.go.id)

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Transparansi adalah adanya keterbukaan informasi. UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur tentang akses terhadap informasi yang dikuasai oleh badan publik (termasuk sekolah/madrasah). Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja sesuai dengan mandat yang diterima kepada orang lain (masyarakat, atasan, ataupun pihak-pihak lain yang telah ditetapkan).

Mardiasmo (2009) Akuntabilitas Publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan hingga hak-hak publik,

yaitu hak untuk tau, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat terpenuhi.

Efisien terkait dengan kuantitas dari suatu kegiatan. Seringkali efisiensi digambarkan sebagai perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Selain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi suatu parameter yang tidak dapat dipisahkan dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat yang dalam hal ini komite sekolah dan wali murid (Fadli, 2013).

Akuntabilitas merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang harus mempertanggung jawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada masyarakat (komite sekolah dan wali murid). Akuntabilitas dalam program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menyangkut hak masyarakat (wali murid) untuk memperoleh pertanggung jawaban penyelenggaraan program Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) di Kecamatan Rimbo Ulu.

Berdasarkan Studi Pendahuluan yang telah dilakukan peneliti, mengenai penerapan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip transparansi, masih ada sekolah yang dalam penyusunan keuangan baru melibatkan tim manajemen sekolah (Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara).

Dalam pelaksanaan anggaran sekolah pihak guru, karyawan, dan komite hanya mengetahui anggaran kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran. Dalam evaluasi anggaran secara umum, sekolah tidak melibatkan guru, karyawan, dan orang tua, tetapi mereka hanya mengetahui hasil evaluasi anggaran

kegiatan sekolah dan laporan pengeluaran dana.

Proses perencanaan anggaran keuangan sekolah hanya dilakukan oleh pihak internal sekolah. Guru, karyawan, dan orang tua tidak mengetahui secara jelas mengenai sumber pendapatan dana yang diterima dan dikeluarkan oleh sekolah. Partisipasi masyarakat yang kurang karena tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelas terlihat bahwa di dalam implementasinya, fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada terlihat partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di sekolah.

Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari - Maret, April - Juni, Juli - September, dan Oktober - Desember. Karena keterbatasan jarak dan waktu bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil), sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan. Peneliti mengambil data laporan pertanggung jawaban dana BOS SMP N 9 KAB. TEBO sebagai contoh penerimaan dana BOS yang per triwulan.

Good governance pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Good governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Setyawan, 2015).

Partisipasi, transparansi, akuntabilitas merupakan bagian dari pilar “*good governance*” dan berkaitan erat dengan tata kelola pendidikan (*good education governance*). Dengan kata lain manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian

aktifitas yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul “**Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu**”.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2012, BOS adalah suatu program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no. 62 tahun 2011 bab III pasal 3,4 dan 5 tentang penganggaran dana BOS, sebagai berikut :

- a) Pendapatan belanja BOS dianggarkan dalam APBD Provinsi setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dan penyesuaian serta

rincian objek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar.

- c) Penganggaran pendapatan BOS menggunakan kode rekening (Permen RI, 2011).

d)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 62 Tahun 2011, bab IV pasal 6 dan 7 tentang pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS, sebagai berikut :

- a) PPKD melaksanakan anggaran BOS berdasarkan DPA-PPKD.
- b) Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan DPA-PPKD.
- c) Daftar penerima dan jumlah BOS dilakukan sekali dalam setahun anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama (Permen RI, 2011).

Adapun tim manajemen BOS sekolah terdiri dari :

- a) Penanggung jawab yang terdiri dari kepala sekolah
- b) Anggota yang terdiri dari bendahara BOS sekolah dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan (Permendikbud, 2013).

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia (Permendikbud, 2013). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 101 Tahun 2013, bahwa Biaya Operasional Sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Fadli (2013) partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran. Menurut Fadli (2013) tujuan partisipasi adalah tuntutan dari masyarakat agar mereka harus diberdayakan, diberikan kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan atau kebijakan publik. Bentuk partisipasi yaitu:

1. Keterlibatan masyarakat melalui terciptanya nilai dan komitmen
2. Adanya forum untuk menampung partisipasi,
3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan
4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi
5. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam penelitian ini merepresentasikan bahwa masyarakat mempunyai peran besar dalam mendinamisasi kegiatan sekolah. Sehingga pertanggung jawaban yang diberikan oleh sekolah, yaitu dengan membuat laporan pertanggung jawaban yang ditempel di papan pengumuman sekolah yang sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang ikut terlibat dan mendukung kegiatan sekolah. Partisipasi masyarakat berarti adanya keterlibatan masyarakat biasa dalam urusan-urusan setempat secara langsung. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi.

Transparansi Pemerintahan

Transparansi pemerintahan menurut Krina (2010) adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Krina bentuk transparansi yaitu:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan.
4. Meningkatkan arus informasi.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Tidak hanya transparansi dan partisipasi, akuntabilitas juga sangat penting dilakukan dalam pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS. Akuntabilitas merupakan keadaan yang dinilai karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu yang

dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, managerial, dan program atau kegiatan.

Akuntabilitas Publik

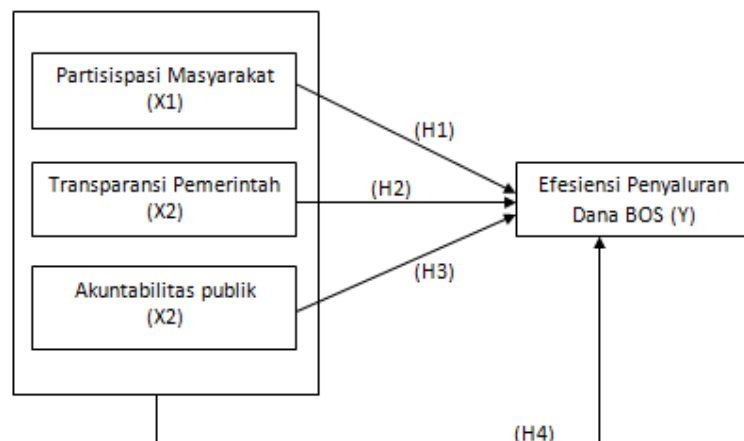
Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dari beberapa pemaparan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana BOS yang diperoleh oleh sekolah sebagai satu-satunya sumber keuangan sebagai sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di sekolah yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Hal ini berarti sekolah sebagai instansi pendidikan wajib memberikan pertanggung jawaban kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah terkait pengelolaan anggaran dana BOS.

Kerangka Koseptual

Berikut ini kerangka konseptual penelitian ini

Gambar 1 Kerangka pemikiran



Hipotesis

- H1 : Partisipasi masyarakat berpengaruh secara persial terhadap efisiensi penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kecamatan Rimbo Ulu tahun 2015
- H2 : Transparansi pemerintahan berpengaruh secara persial terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) di Kecamatan Rimbo Ulu tahun 2015
- H3 : Akuntabilitas publik berpengaruh secara persial terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) di Kecamatan Rimbo Ulu tahun 2015
- H4 : Partisipasi masyarakat, transparansi pemerintahan, dan akuntabilitas publik berpengaruh secara simultan terhadap efisiensi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) di Kecamatan Rimbo Ulu tahun 2015.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipoesis yang telah di tetapkan (Sugiyono, 2014). Data penelitian ini merupakan data primer

dengan kuesioner sebagai instrument penelitian. Yang menjadi objek penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) yang berada di Kecamatan Rimbo Ulu.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri yang berada di Kecamatan Rimbo ulu. Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri yang berada di Kecamatan Rimbo ulu terdiri dari 5 Sekolah Menengah Pertama Negeri. Yang menjadi objek penelitian adalah Guru, karyawan Tata Usaha dan Komite Sekolah dengan total 145 orang. metode penarikan sampel menggunakan *sampling jenuh*(Sugiyono, 2014) ialah peneliti teknik penentuan sampeldengan menggunakan semua populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Komite, TU, bendahara BOS, dan dewan guru pada masing-masing Sekolah Menengah Pertama negeridi Kecamatan Rimbo Ulu. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 145 dan kesemuanya adalah Komite, TU, bendahara BOS, dan dewan guru pada masing-masing Sekolah yang akan diberi pertanyaan mengenai persepsi mereka tentang evaluasi pasrtisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas terhadap efesiensi penyaluran dana BOS.

Definisi Operasional Variabel

Berikut Tabel Defenisi Operasional Variabel:

Tabel 1 Defenisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

NO	Variabel	Indikator	Skala
1	Partisipasi Masyarakat X	1. Keterlibatan masyarakat melalui terciptanya nilai dan komitmen	Likert
		2. Adanya forum untuk menampung partisipasi	Likert
		3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan	Likert
		4. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi	Likert
		5. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan	Likert

		keputusan	
2	Transparansi Pemerintah X2	1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab	Likert
		2. Kemudahan akses informasi	Likert
		3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan	Likert
		4. Meningkatkan arus informasi	Likert
3	Akuntabilitas Publik X3	1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan	Likert
		2. Membuat suatu keputusan, setiap keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, sesuai prinsip administrasi yang benar	Likert
		3. Akurasi dan kelengkapan informasi	Likert
		4. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan	Likert
		5. Kelayakan dan konsistensi	Likert
		6. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.	Likert
4	Efisiensi Penyaluran Dana Bos Y	1. Pembelian/pengadaan buku teks pelajaran	Likert
		2. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru	Likert
		3. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa	Likert
		4. Kegiatan ulangan dan ujian	Likert
		5. Pembelian bahan-bahan habis pakai	Likert
		6. Langganan daya dan jasa	Likert
		7. Perawatan sekolah	Likert
		8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer	Likert
		9. Pengembangan profesi guru	Likert
		10. Membantu siswa miskin	Likert
		11. Pembiayaan pengelolaan bos	Likert
		12. Pembelian perangkat komputer	Likert
		13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS	Likert

Sumber: Penelitian-Penelitian Terdahulu

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang pertama kali dilakukan peneliti adalah Uji validitas dan Uji Reabilitas instrumen penelitian (Kuesioner). Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian Uji Regresi Linear

Berganda dengan pengujian asumsi klasik sebagai prasyarat. Pengujian hipotesis parsial dan hipotesis simultan dilaksanakan dengan Uji-t, Uji-F dan pengujian koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil diperoleh dari pengujian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Uji Validitas Penelitian

No	Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
1	PM*-Pertanyaan 1	0,764	0,136	Valid
2	PM*-Pertanyaan 2	0,256	0,136	Valid
3	PM*-Pertanyaan 3	0,809	0,136	Valid
4	PM*-Pertanyaan 4	0,589	0,136	Valid
5	PM*-Pertanyaan 5	0,699	0,136	Valid
6	TP*-Pertanyaan 1	0,740	0,136	Valid
7	TP*-Pertanyaan 2	0,601	0,136	Valid
8	TP*-Pertanyaan 3	0,695	0,136	Valid
9	TP*-Pertanyaan 4	0,649	0,136	Valid
10	PAP*-Pertanyaan 1	0,663	0,136	Valid
11	PAP*-Pertanyaan 2	0,282	0,136	Valid
12	PAP*-Pertanyaan 3	0,725	0,136	Valid
13	PAP*-Pertanyaan 4	0,713	0,136	Valid
14	PAP*-Pertanyaan 5	0,699	0,136	Valid
15	PAP*-Pertanyaan 6	0,666	0,136	Valid
16	PEPDB*-Pertanyaan 1	0,722	0,136	Valid
17	PEPDB*-Pertanyaan 2	0,328	0,136	Valid
18	PEPDB*-Pertanyaan 3	0,703	0,136	Valid
19	PEPDB*-Pertanyaan 4	0,676	0,136	Valid
20	PEPDB*-Pertanyaan 5	0,679	0,136	Valid
21	PEPDB*-Pertanyaan 6	0,709	0,136	Valid
22	PEPDB*-Pertanyaan 7	0,363	0,136	Valid
23	PEPDB*-Pertanyaan 8	0,724	0,136	Valid
24	PEPDB*-Pertanyaan 9	0,377	0,136	Valid
25	PEPDB*-Pertanyaan 10	0,660	0,136	Valid
26	PEPDB*-Pertanyaan 11	0,674	0,136	Valid
27	PEPDB*-Pertanyaan 12	0,676	0,136	Valid

Keterangan:

PM*- => Partisipasi Masyarakat

TP*- => Transparansi Pemerintah

PAP* => Pernyataan Transparansi Pemerintah

PEPDB*- => Pernyataan Efisiensi Penyaluran Dana Bos

Sumber: Data Olahan 2016

Pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua r_{hitung} pertanyaan yang diberikan kepada responden lebih tinggi dari r_{tabel}

penelitian ini. Maka dapat disimpulkan kuesioner tersebut valid. Berikut ini tabel reabilitas penelitian ini:

Tabel 3 Tabel Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
PM Partisipasi Masyarakat	,607	5
Transparansi Pemerintah (TP)	,688	4
Pernyataan Transparansi Pemerintah (PAP)	,687	6
Pernyataan Efisiensi Penyaluran Dana Bos (PEPDB)	,852	13

Sumber: Hasil Pengolahan data dengan SPSS (2016)

Hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa nilai hasil setelah validitas semuanya reliabel karena diatas 0,6 sedangkan hasil penguji alpha sebesar semua variabel lebih besar dari 0,60

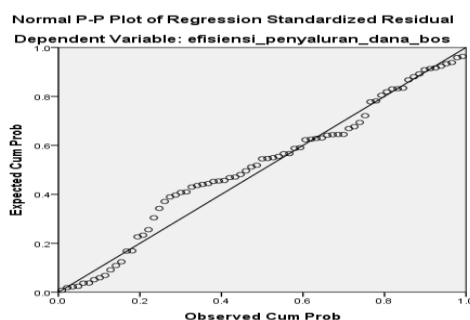
Sehingga dapat dinyatakan bahwa kuesioner tersebut telah reliabel dan dapat disebarkan kepada responden untuk dijadikan sebagai instrument penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat gambar 2 dibawah ini:

Gambar 2 Uji Normalitas



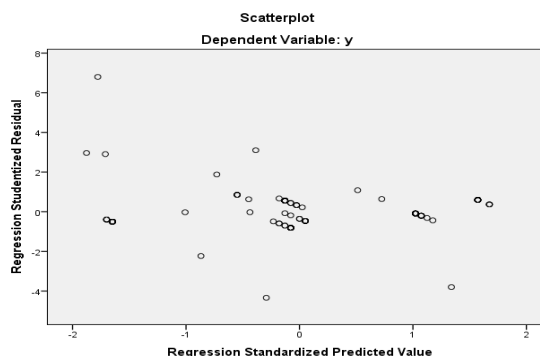
Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2016

Dari Gambar 2 terlihat bahwa nilai Plot P-P terletak disekitar garis diagonal. Jika kita lihat lebih jauh terlihat bahwa nilai P-P plot tidak menyimpang jauh dari garis diagonal sehingga bisa diartikan bahwa distribusi data efisiensi penyaluran dana bos adalah normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidak samaan varian dari residual pada model regresi. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan gambar spss versi 22.0 adalah sebagai berikut:

Gambar 3 .Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2016

Berdasarkan Gambar 3 di atas dapat dilihat penyebaran residual tidak teratur. Hal tersebut dapat dilihat pada plot yang terpengar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan hasil demikian, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau persamaan regresi memenuhi syarat asumsi klasik (Santoso dan Ashari, 2005).

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini menggunakan rumus VIF dengan bantuan SPSS for windows 22.0 yang hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,744	2,018		3,838	,000		
Partisipasi_masyarakat	,628	,166	,255	3,794	,000	,269	3,715
Transparansi_pemerintah	-,178	,136	-,067	-1,313	,191	,470	2,127
Akuntabilitas_publik	1,473	,148	,731	9,971	,000	,225	4,441

a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016)

Dari hasil pengolahan data diatas kolom VIF, dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk X1 sebesar 3,715, X2 sebesar 2,127, X3 sebesar 4,441. Karena nilai VIF

tersebut kurang dari 10 (sepuluh) maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas.

Regresi Linier Berganda

Berikut ini tabel hasil regresi linear berganda

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,841	1,036		1,778	,078
partisipasi_masyarakat	,351	,223	,139	1,572	,119
transparansi_pemerintah	,165	,090	,053	1,834	,069
akuntabilitas_publik	1,691	,180	,802	9,386	,000

Sumber: Hasil olahan data SPSS 22.0 (2016)

Berdasarkan hasil pengolahan data seperti terlihat pada tabel 4.21 pada kolom

(*unstandardized Coefficients*) bagian B diperoleh model persamaan regresi linier

berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,142 + 0,351X_1 + 0,165X_2 + 1,691X_3 + e$$

Pengujian Hipotesis

Uji t (Pengujian Parsial)

Berdasarkan tabel 5, maka pengujian hipotesis parsial yaitu hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 adalah sebagai berikut

1. Hipotesis pertama diterima, Artinya variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Rimbo Ulu.
2. Hipotesis kedua ditolak, artinya Artinya variabel transparansi

pemerintah tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Rimbo Ulu.

3. Hipotesis ketiga diterima dan dinyatakan berpengaruh signifikansi karena $0.000 < 0,05$. Artinya variabel akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Rimbo Ulu.

Uji F (Pengujian Simultan)

Berikut ini tabel pengujian simultan penelitian ini

Tabel 6 Hasil Uji F ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1760,759	3	586,920	228,060	.000 ^b
Residual	362,868	141	2,574		
Total	2123,628	144			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

Sumber: Hasil Olahan Data Dengan SPSS 22.0 (2016)

Berdasarkan Tabel ke-6, maka hipotesis keempat diterima, dengan demikian variabel partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah dan akuntabilitas

publik berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana bos di kecamatan Rimbo Ulu.

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Berikut ini tabel koefisien determinasi

Tabel 7 Uji Determinasi (R²) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.829	.825	1,604

a. Predictors: (Constant), x3, x2, x1

b. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil olahan data SPSS 22.0 (2016)

Hasil pengujian koefisien korelasi (R) sebesar 0,825 yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel partisipasi masyarakat (X1), transparansi pemerintah (X2) dan akuntabilitas publik (X3). Hasil pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS 22.0 *for windows* maka didapat lah R Squarenya adalah 0,825, hal ini menunjukkan bahwa 82,5% variabel efisiensi penyaluran Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Rimbo Ulu dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas publik sedangkan 18,5% merupakan pengaruh dari variabel bebas yang lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

Pembahasan hasil penelitian

Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X1) Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana BOS (H1)

Dalam penelitian ini peneliti telah menguji secara persial variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Rimbo Ulu. Karena diketahui $t_{hitung} 1,572 < t_{tabel} 1.976$ dengan tingkat signifikan $0.119 > 0,05$.

Pengaruh Tranparansi Pemerintah (X2) Terhadap Efisiensi Dana BOS (H2)

Dalam penelitian ini peneliti telah menguji secara persial variabel transparansi masyarakat tidak berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Rimbo Ulu. Karena diketahui $t_{hitung} 1,834 < t_{tabel} 1.976$ dengan tingkat $0,069 > 0,05$.

Pengaruh Akuntabilitas Publik (X3) Terhadap Efisiensi Dana BOS (H3)

Dalam penelitian ini peneliti telah menguji secara persial variabel akuntabilitas publik berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Rimbo Ulu. Karena

diketahui $t_{hitung} 9,386 < t_{tabel} 1.976$ dengan tingkat signifikan $0.000 < 0,05$.

Pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah dan akuntabilitas publik (X3) Terhadap Efisiensi Dana BOS (H3)

Dari hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{Tabel}$ sebesar $228,060 > 2.67$ dan dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ (alpha). Berarti H_0 ditolak H_a diterima, dengan demikian variabel partisipasi masyarakat, transparansi pemerintah dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana bos di kecamatan Rimbo Ulu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berikut ini hasil penelitian ini :

1. Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu
2. Transparansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu
3. Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu
4. Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Di Kecamatan Rimbo Ulu

Saran

Saran yang peneliti rekomendasikan adalah sebagai berikut. Sekolah diharapkan dapat melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dalam mengelola keuangan sekolah. Mewujudkan prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi Pemerintahan Dan Akuntabilitas Publik dalam pengelolaan keuangan sekolah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Perlu adanya staf khusus pengelola BOS sesuai dengan petunjuk teknis sehingga kinerja sekolah menjadi lebih efisien.

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak ruang lingkup sampel yang tidak hanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, tapi dalam cakupan yang lebih luas untuk pemetaan daerah dengan tingkat Efisiensi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilliani, (2014). Pengaruh prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran terhadap produktifitas. Universitas negeri padang : Jurnal
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian. Edisi Revisi V. PT. Rineka. Cipta. Jakarta.
- Dedi Nordiawan., dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2012. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dwi Ristya. (2013). Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Universitas airangga : Jurnal
- Erwantosim. (2010). Analisis efektifitas, akuntabilitas dan transparansi bantuan operasional sekolah pada sekolah menengah pertama di kota padang. UNAND : Skripsi
- Fadli, (2013). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah menengah atas s SMA N 1 pejagoan tahun 2014. Universitas Maritim : Skripsi
- Fierda, (2015). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholder di SD islam binakheir. Universitas islam negeri syarifhidayatullah : Skripsi
- Haryanto. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Krina P. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Publik Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Mulyadi dan Johny, Setyawan. (2001). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Edisi kedua, cetakan pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Priyatno, Duwi. (2010). Paham Analisa Statistika Data Dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom
- Permendikbud, Nomor 101 tahun 2013. Pengertian bantuan operasional sekolah
- Rezky, Ega. (2015). Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program rencana kegiatan dan anggaran sekolah di SD N pacarkeling. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sangadji, Etta. Mamang., dan Sopiah. (2010). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Andi.

- Sri Minarti. (2011). Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Sonny Sumarsono. (2010). Manajemen Keuangan Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santosa & Ashari. (2005). analisis statistik dengan microsoft excel dan SPSS, penerbit ANDI, Yogyakarta
- Sutedjo. (2009). presepsi stakeholder terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah. Kendal: Skripsi
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan, R&D, penerbit Alfabeta, Bandung
- Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Undang – undang nomor 14 tahun 2008 tentang transparansi
- Undang – undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik